

Artikel Penelitian

PERSEPSI PETANI TERHADAP PENGELOLAAN IRIGASI PADA DAERAH IRIGASI BANDAR SAWAH PADANG KABUPATEN SOLOK SELATAN

Oleh:
AMRI ISMAIL

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk melihat persepsi petani P3A terhadap pengelolaan irigasi di Daerah irigasi Bandar Sawah Padang, Kabupaten Solok Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Variable penelitian terdiri dari variable bebas, yaitu persepsi petani, dan variable terikat, meliputi perolehan air, alokasi air, sistem pemeliharaan, pengadaan sumberdaya, dan penanganan konflik. Analisis data menggunakan analisis statistic deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: P3A mempermudah petani dalam memperoleh air irigasi dan menyediakan air dalam jumlah yang besar, P3A selalu mendistribusikan air pada setiap petani tanpa pembedaan dan alokasi distribusi penggunaan air memperhitungkan ketersediaan dan kebutuhan air, P3A selalu mendorong petani ikut serta melakukan pemeliharaan dan merawat sistem saluran irigasi, P3A menghimpun tenaga kerja untuk pemeliharaan irigasi, P3A perlu menghimpun dana melalui iuran kepada petani untuk pemeliharaan irigasi, P3A menampung dan menengahi perselisihan akibat alokasi air.

Kata Kunci: persepsi, pengelolaan, irigasi, Bandar Sawah Padang.

Abstract:

This study aims to look at the perception of farmers on irrigation management P3A in irrigation area of Bandar Sawah Padang, Solok Selatan. This research is a quantitative research. Variable consisted of independent variables, namely the perception of farmers, and the dependent variable, includes water acquisition, water allocation, system maintenance, procurement of resources, and handling conflict. Analyzed using descriptive statistics. The results showed that: P3A facilitate the farmers in obtaining water for irrigation and to provide water in large amounts, P3A always distributes water to each farmer without distinction and allocation distribution of water use taking into account the availability and water needs, the P3A always encourage farmers to participate and perform maintenance and care irrigation channel system, P3A gather manpower for maintenance of irrigation, P3A need to raise funds through dues to farmers for irrigation maintenance, P3A accommodate and mediate disputes as a result of the allocation of water.

Keywords: perception, management, irrigation, Bandar Sawah Padang

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan sebuah negara berkembang yang terus berupaya menggalakkan pembangunan dalam berbagai bidang, baik bidang ekonomi, politik, hingga pembangunan bidang pertanian. Sebagai sebuah negara kepulauan dengan susunan tanah yang terdiri dari tanah alluvial, sebagian besar wilayah Indonesia sangat cocok dijadikan untuk areal persawahan dengan tumbuhan padi yang dapat berkembang subur di kebanyakan dataran rendahnya. Lahan tanah untuk pertanian sebagian besar tersedia di daerah pedesaan. Oleh karena itu, dapat diperkirakan, bahwa struktur masyarakat pedesaan sangat terkait dengan struktur agraria yang berlaku, khususnya dalam hal penguasaan dan pengusahaan tanah pertanian untuk mempertahankan kemandirian dan ketahanan pangan.

Dewasa ini, dalam rangka menuju kemandirian dan ketahanan pangan, pemerintah berupaya mendorong peningkatan produksi padi/beras di dalam negeri. Peningkatan produksi beras dalam negeri memberikan manfaat selain pada penghematan devisa nasional juga membuka kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, lahan

pertanian yang ada harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan berbagai macam cara untuk meningkatkan produksi padi/beras, salah satunya adalah dengan menggunakan sistem irigasi.

Sistem irigasi merupakan salah satu sistem pertanian tradisional yang harus dikembangkan secara terus menerus dan diperbaiki guna mencapai hasil pertanian yang lebih baik, tahan hama, dan menghindari konflik diantara masyarakat terkait soal penggunaan *common property*. Kebijakan pengelolaan irigasi yang selama ini dapat dilihat dengan tercapainya swasembada pangan, khususnya beras pada tahun 1984. Pengelolaan sistem irigasi saat itu dilakukan hampir di seluruh wilayah di Indonesia.

Irigasi merupakan komponen penting bagi kegiatan pertanian di Indonesia. Pada awalnya, kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sistem irigasi di tingkat usaha tani telah ditetapkan dalam 2 (dua) landasan hukum, yaitu Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 13/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Irigasi. Selanjutnya keluar pula aturan terbaru sekaitan dengan pengeolaan irigasi, yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No. 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan

Email: amriismail3@yahoo.com

Jaringan Irigasi. Ketiga landasan hukum ini menekankan bahwa pengelolaan sistem irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air. Artinya, segala tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di tingkat tersier menjadi tanggung jawab lembaga perkumpulan petani pemakai air. Hal ini secara khusus tertera dalam Pasal 1 ayat 18 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No. 12/PRT/M/2015 bahwa: Perkumpulan petani pemakai air adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.

Selanjutnya, menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI No. 12/PRT/M/2015, pada Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa: “Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk mengalirkan air sampai pada areal persawahan diperlukan jaringan irigasi, dan air irigasi diperlukan untuk mengairi persawahan, oleh sebab itu kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air.

Permasalahan yang ditemui dewasa ini sekaitan dengan sistem irigasi adalah banyaknya fungsi prasarana irigasi, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun fungsinya, yang banyak mengalami penurunan akibat banyaknya jaringan irigasi mengalami degradasi. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan system pengelolaan irigasi yang baik dan mengakomodir kepentingan seluruh petani pemakai air. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam mewujudkan pengelolaan irigasi yang berkelanjutan, berjalannya fungsi irigasi sangat tergantung pada partisipasi aktif petani terhadap operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi serta kontribusi dalam penyediaan biaya operasi dan pemeliharaan jaringan melalui iuran pelayanan irigasi, dimana P3A berwenang memungut iuran tersebut. Namun kenyataannya, pelaksanaan program tersebut tidak menunjukkan hasil seperti yang diharapkan.

Ketidakberhasilan berbagai kebijakan pemerintah dalam pengelolaan irigasi disebabkan pendekatan top-down yang diterapkan di dalam pembangunan keirigasian selama ini tidak sesuai dengan sifat irigasinya yang memiliki karakteristik sosioteknik yang ditunjukkan oleh rendahnya partisipasi petani, rendahnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan cepatnya terjadi kerusakan pada jaringan irigasi. Dengan pendekatan top-down

Email: amriismail3@yahoo.com

tersebut, P3A yang diharapkan memainkan peran yang lebih besar dalam pengelolaan irigasi belum berkembang sesuai dengan harapan.

Jika dilihat dari sudut ideology, P3A merupakan sebuah lembaga yang memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat petani yang sejahtera melalui hasil pertanian yang dikelola agar sesuai dengan cita-cita Pancasila (sebagai ideology bangsa dan Negara Indonesia), yaitu menciptakan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera (Dinas PU Pengairan, 1999:23). Pembentukan P3A harus sesuai dengan asas Pancasila, yaitu gotong royong dan berwawasan lingkungan. Sementara jika ditinjau dari sisi kelembagaan, P3A merupakan sebuah lembaga yang menjadi wadah bagi petani yang menggantungkan hasil pertanian dari saluran irigasi. Selanjutnya, jika ditinjau secara praktis, P3A merupakan sebuah lembaga yang diharapkan memiliki inisiatif swadaya ataupun swakelola dalam melestarikan kedayagunaan jaringan irigasi, sementara pemerintah sesuai daerah kewenangannya bertanggungjawab untuk mendukung inisiatif yang muncul dari petani.

Sekaitan dengan P3A di Indonesia, di beberapa daerah menggunakan nama yang berbeda, seperti HIPPA di Jawa Timur, Subak di Bali, Mitra Cai di Jawa Barat, dan lain sebagainya. Terlepas dari perbedaan

nama itu, tetap satu hal yang tidak bisa disangkal adalah arti penting dari keberadaan P3A ini, karena keberadaannya memiliki titik strategis (*entry point*) dalam menggerakkan sistem agribisnis di pedesaan. Untuk itu segala sumberdaya yang ada di pedesaan perlu diarahkan/diprioritaskan dalam rangka peningkatan profesionalisme dan posisi tawar petani (kelompoktani). Bahkan P3A dianggap sebagai suatu badan yang dapat membantu untuk menyukseskan program-program pemerintah di bidang pertanian. Tujuan pembentukan P3A ini antara lain: a) membantu dalam meningkatkan efisiensi penggunaan air pada tingkat usahatani, b) membagi air pada blok tersier secara merata, c) memelihara bangunan-bangunan tersier air secara baik, d) mengatur pelaksanaan jadwal tanam dan pola tanam yang telah ditentukan oleh pemerintah, e) membayar iuran pelayanan irigasi, dan f) meredakan konflik terhadap pembagian air.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka kelembagaan P3A secara organisatoris, teknis, dan finansial diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pembangunan, rehabilitasi, eksploitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapannya dalam petak tersier, kwarter, desa, dan subak sehingga terlihat bahwa lembaga tersebut sebenarnya dapat memberikan

kontribusi yang besar bagi keberhasilan pengelolaan air irigasi di tingkat tersier. (Fitria, 2008).

Tidak bisa dipungkiri bahwa dewasa ini, diperlukan kelembagaan P3A yang kuat, mandiri, dan berdaya sehingga pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan, dan pada akhirnya mampu meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. Kelembagaan ini juga terdapat di Kabupaten Solok Selatan, yang merupakan gabungan dari petani-petani pemakai air dan secara bersama-sama melakukan pengelolaan jaringan irigasi.

Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat dan sebagian masyarakatnya memiliki profesi sebagai petani yang masuk dalam keanggotaan P3A. Di sini, pengelolaan irigasi di Kabupaten Solok Selatan, khususnya di daerah irigasi Bandar Sawah Padang, telah dilaksanakan program WISMP (*Water Resources and Irrigation Sector Management Project*) yang diterapkan tahun 2007-2009 (tahap I) dan dilanjutkan dengan periode 2014-2015 (tahap II). WISMP ini merupakan usaha pemerintah dalam mendorong dan menetapkan desentralisasi pengembangan

dan pengelolaan SDA yang dibiayai oleh *World Bank* dan biaya pendamping dan *parallel financing* dari pemerintah Indonesia yang mencakup 4 komponen, yaitu; (1) peningkatan pengelolaan SDA Wilayah Sungai; (2) peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif; (3) Peningkatan Pengelolaan dan Rehabilitasi Sistem Irigasi; dan (4) Pengelolaan Proyek dan Bantuan Teknis (BPS Kab Solok Selatan, 2015:23).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sistem irigasi yang handal sangat diperlukan dan dapat dilakukan melalui peran P3A yang kompetitif yang dapat mendukung peningkatan produksi pertanian. Dengan demikian, partisipasi petani P3A dalam pengelolaan irigasi sangat dibutuhkan. Partisipasi ini akan muncul melalui persepsi positif yang diberikan petani terhadap perkumpulan P3A. Persepsi petani terhadap pengelolaan jaringan irigasi merupakan pendapat dan penilaian petani terhadap kinerja dari lembaga P3A dalam mengelola jaringan irigasi. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, persepsi petani yang tergabung dalam P3A terhadap pengelolaan irigasi di daerah irigasi Bandar Sawah Padang sangat mempengaruhi hasil penelitian ini, oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk menjangkau persepsi petani irigasi di daerah Irigasi Bandar Sawah Padang terhadap pengelolaan irigasi,

Email: amriismail3@yahoo.com

sehingga nantinya dapat terjaring suatu kesimpulan yang dapat menegaskan bahwa program pengelolaan irigasi mampu menjadi suatu wadah yang dapat menaikkan hasil produksi tani di Kabupaten Solok Selatan umumnya, yang nantinya akan berpengaruh positif terhadap pendapatan petani dan juga akan mempengaruhi ketahanan pangan khususnya beras. Berdasarkan hal ini, perlu dikaji mengenai persepsi petani terhadap pengelolaan irigasi di daerah irigasi Bandar Sawah Padang Kabupaten Solok Selatan.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang di atas, penelitian ini mengkaji mengenai persepsi petani terhadap pengelolaan irigasi. Dewasa ini, sistem irigasi digunakan oleh seluruh petani di hampir seluruh wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Mengingat luasnya kajian penelitian, maka peneliti membatasi kajian pada daerah irigasi Bandar Sawah Padang di Kabupaten Solok Selatan.

Permasalahan dalam penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “bagaimana persepsi petani terhadap pengelolaan irigasi di daerah irigasi Bandar Sawah Padang Kabupaten Solok Selatan?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi petani terhadap pengelolaan irigasi di daerah irigasi Bandar Sawah Padang Kabupaten Solok Selatan.

D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan dan manfaat sebagai berikut:

1. Menjadi bahan referensi atau rujukan kepada pemerintah atau pihak terkait dalam rangka mengetahui persepsi petani terhadap pengelolaan irigasi.
2. Memberikan rekomendasi kepada *Stakeholders* pengelola irigasi untuk masa mendatang di kabupaten Solok Selatan.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian diartikan sebagai suatu cara melakukan penyelidikan atau mencari suatu fakta yang dilakukan secara sistematis dan obyektif. Menurut Hadari (2005) metode pada dasarnya berarti cara yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan. Tujuan umum penelitian adalah untuk memecahkan masalah, maka langkah-langkah yang akan ditempuh harus relevan dengan masalah yang dirumuskan.

A. Metode dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, karena pendekatan kuantitatif dapat menghasilkan data yang akurat setelah penghitungan yang tepat. Pendekatan kuantitatif merupakan salah satu pendekatan dalam penelitian yang lebih ditekankan pada data yang dapat dihitung untuk menghasilkan penafsiran kuantitatif yang kokoh (Sugiyono, 2004:36). Penelitian kuantitatif pun sifatnya adalah objektif, sehingga kita bisa melihat langsung sebuah keadaan.

Adapun desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variabel dan fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya (Subana dan Sudrajat, 2001:89). Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengungkapkan dan mendeskripsikan secara faktual, akurat dan sistematis mengenai persepsi petani terhadap pengelolaan irigasi di daerah irigasi Bandar Sawah Padang Kabupaten Solok Selatan.

B. Lokasi Penelitian

Berhubung lokasi irigasi hampir menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Solok Selatan maka dipilih lokasi irigasi yang dianggap dapat mewakili karakteristik dan permasalahan yang ada yaitu daerah

irigasi di Bandar Sawah Padang Kabupaten Solok Selatan. Alasan pemilihan lokasi ini adalah lokasi ini sangat strategis, mudah dijangkau, dan hemat biaya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini, sebuah persepsi terhadap pengelolaan air, petani memberikan tanggapan tentang apa yang ia dapatkan. Analisa satu variabel ini dapat dijadikan sebuah gambaran dari data instrument. Adapun langkah pertama yang dilakukan untuk menganalisa tabel ini yaitu dengan menyusunnya sesuai dengan jumlah nilai pernyataan untuk setiap variabel.

Berdasarkan hasil penyebaran angket kepada 100 responden tentang persepsi petani terhadap pegelolaan air di daerah irigasi Bandar Sawah Padang, maka diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 1
Persepsi Petani Terhadap Pengelolaan Perolehan Air

Persepsi Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
P3A mempermudah petani dalam memperoleh air irigasi	Setuju	92	92%
	Tidak setuju	8	8%
P3A menyediakan air dalam jumlah yang besar	Setuju	87	87%
	Tidak setuju	13	13%

Sumber: Hasil Pengolahan Data primer, 2016

Tabel 1 menunjukkan bahwa banyak responden yang menyetujui bahwa selama ini P3A selalu mempermudah petani dalam memperoleh air irigasi untuk mengairi sawah mereka, baik dalam hal kesiapan dan kesigapan dalam menyalurkan air irigasi. Hal tersebut terlihat dari banyaknya responden yang menjawab setuju (92 responden atau 92%). Sementara itu, 8 orang responden (8%) menyatakan tidak setuju karena menurut mereka, prosedur saat mereka meminta perolehan air kepada P3A tidak gampang, dimana mereka harus melapor terlebih dahulu, kemudian menunggu selama beberapa hari, baru kemudian mereka mendapatkan perolehan air irigasi.

Selain itu, petani juga menilai mengenai penyediaan air oleh P3A, dimana sebanyak 87 responden (87%) menyatakan setuju bahwa P3A selalu menyediakan air dalam jumlah yang besar, terbukti dari mereka tidak pernah merasa kekurangan air irigasi dalam beberapa tahun belakangan. Sementara 13 orang responden (13%) merasa tidak setuju jika P3A selalu menyediakan air dalam jumlah besar, karena menurut mereka, irigasi untuk pesawahan mereka kadang kala tidak teraliri oleh air.

Tabel 2
Persepsi Petani Terhadap Pengelolaan
Alokasi Air

Persepsi	Jawa-	Fre-	Persen-
----------	-------	------	---------

Responden	ban	kwensi	tase
P3A selalu mendistribusikan air kepada setiap petani	Setuju	92	92%
	Tidak setuju	8	8%
Alokasi distribusi penggunaan air memperhitungkan ketersediaan dan kebutuhan air	Setuju	91	91%
	Tidak setuju	9	9%

Sumber: Hasil Pengolahan Data primer, 2016

Tabel 2 menunjukkan banyak dari responden yang berpendapat bahwa selama ini tidak adanya perbedaan perlakuan dalam hal pendistribusian air pada petani, terbukti dari 92 responden (92%) petani menyatakan setuju dan berharap agar perlakuan perbedaan itu tidak pernah ada. Hanya 8 responden (8%) yang menyatakan tidak setuju bahwa P3A selalu mendistribusikan air kepada setiap peserta, dalam artian bahwa 8 responden ini beranggapan bahwa P3A melakukan pendistribusian air hanya kepada petani tertentu saja.

Selanjutnya, dalam hal alokasi distribusi penggunaan air memperhitungkan ketersediaan dan kebutuhan air, sebanyak 91 orang responden (91%) setuju agar alokasi distribusi penggunaan air memperhitungkan ketersediaan dan kebutuhan air, sementara sisanya 9 orang responden (9%) tidak setuju alokasi distribusi penggunaan air memperhitungkan ketersediaan dan kebutuhan air, dengan alasan bahwa

ketersediaan air sangat banyak, dengan demikian tidak perlu adanya distribusi penggunaan air dengan cara memperhitungkan ketersediaan dan kebutuhan air.

Tabel 3
Persepsi Petani Terhadap Sistem
Pemeliharaan irigasi

Persepsi Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
Sistem pemeliharaan saluran irigasi selalu dilakukan secara gotong royong oleh petani yang tergabung dalam P3A	Setuju	7	7%
	Tidak setuju	93	93%
P3A selalu mendorong petani ikut serta melakukan pemeliharaan dan merawat system saluran irigasi	Setuju	7	7%
	Tidak setuju	93	93%

Sumber: Hasil Pengolahan Data primer, 2016

Dari tabel 3 dapat diketahui banyak kebanyakan responden menyatakan bahwa tanggung jawab melakukan pemeliharaan saluran irigasi adalah tanggung jawab pemerintah, sehingga mereka tidak setuju jika sistem pemeliharaan saluran irigasi selalu dilakukan secara gotong royong oleh petani yang tergabung dalam P3A (93 responden atau 93%), dengan alasan bahwa petani tidak memiliki biaya dan pengetahuan untuk mengelola dan

memelihara jaringan irigasi tersebut, terlebih jika ada yang rusak dan lain sebagainya. Sementara sisanya sebanyak 7 orang responden (7%) menyatakan setuju jika sistem pemeliharaan saluran irigasi selalu dilakukan secara gotong royong oleh petani yang tergabung dalam P3A.

Selanjutnya, mengenai P3A yang selalu mendorong petani ikut serta melakukan pemeliharaan dan merawat sistem saluran irigasi, sebanyak 93 responden (93%) tidak setuju dengan kondisi ini, dengan alasan yang serupa dengan alasan sebelumnya, bahwa tanggung jawab mengelola jaringan irigasi adalah tanggung jawab pemerintah, sehingga P3A tidak berwenang untuk mendorong apalagi mengajak petani untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan jaringan irigasi. Sementara sisanya sebanyak 7 orang responden (7%) setuju jika P3A selalu mendorong petani ikut serta melakukan pemeliharaan dan merawat sistem saluran irigasi, dengan alasan bahwa karena mereka yang menggunakan saluran irigasi, maka sudah menjadi tanggung jawab mereka pula untuk melakukan tindakan pemeliharaan dan perawatan dari saluran irigasi tersebut.

Tabel 4
Persepsi Petani Terhadap Sistem
Pengelolaan Pengadaan Sumber Daya untuk
Pemeliharaan Saluran Irigasi

Persepsi Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
P3A	Setuju	7	7%

Email: amriismail3@yahoo.com

menghimpun tenaga kerja untuk pemeliharaan irigasi	Tidak setuju	93	93%
P3A perlu menghimpun dana melalui iuran kepada petani untuk pemeliharaan irigasi	Setuju	3	3%
	Tidak setuju	97	97%

Sumber: Hasil Pengolahan Data primer, 2016

Table 4 menunjukkan bahwa sebagian besar responden (93 responden atau 93%) tidak setuju jika P3A menghimpun tenaga kerja untuk pemeliharaan irigasi, karena responden tetap pada pendirian mereka bahwa pemeliharaan dan perawatan saluran irigasi membutuhkan biaya yang besar sehingga harus menjadi tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab P3A. Dengan demikian, P3A tidak perlu menghimpun tenaga kerja untuk pemeliharaan irigasi, dengan alasan bahwa tenaga kerja itu tentu akan digaji, dan uang untuk menggajinya dari mana? Sementara sisanya, 7 responden atau 7% setuju jika P3A menghimpun tenaga kerja untuk pemeliharaan irigasi, sehingga mereka tidak perlu susah payah untuk melakukan pemeliharaan karena sudah ada tenaga kerja yang memang bertugas untuk itu.

Selanjutnya, hampir seluruh responden (97 responden atau 97%) tidak setuju jika P3A perlu menghimpun dana melalui iuran kepada petani untuk pemeliharaan irigasi,

dengan alasan yang sama bahwa untuk pemeliharaan dan perawatan saluran irigasi membutuhkan biaya yang besar, dan tidak akan cukup dengan iuran dari petani saja. Dengan demikian, tetap menurut mereka bahwa pemerintah yang bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan saluran irigasi. Sisanya, hanya 3 responden (3%) yang setuju jika P3A perlu menghimpun dana melalui iuran kepada petani untuk pemeliharaan irigasi, dengan alasan bahwa mereka yang membutuhkan dan menggunakan saluran irigasi, maka mereka pula yang seharusnya melakukan pemeliharaan dan perawatan. Biaya pemeliharaan dan perawatan dapat dilakukan dengan cara membayar iuran rutin kepada P3A untuk kepentingan tersebut.

Menurut 3 orang responden ini, mekanisme idealnya adalah iuran irigasi seharusnya dibebankan kepada petani pemakai air, yang biasanya dibayar setiap habis panen. Iuran inilah yang menurut mereka diharapkan dapat membayar gaji pengurus P3A sehingga P3A ini mampu melakukan pembagian air irigasi ke sawah dengan tertib dan lancar.

Tabel 5
Persepsi Petani Terhadap Pengelolaan Konflik dalam Pengalokasian Air Irigasi

Persepsi Responden	Jawaban	Frekwensi	Persentase
P3A selalu menampung	Setuju	100	100%
	Tidak	0	0%

Email: amriismail3@yahoo.com

dan menengahi perselisihan akibat alokasi air	setuju		
P3A tidak memberikan air irigasi selain untuk pertanian	Setuju	86	86%
	Tidak setuju	14	14%

Sumber: Hasil Pengolahan Data primer, 2016

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan seluruh responden (100%) setuju jika P3A menampung dan menengahi perselisihan akibat alokasi air. Memang tidak bisa dipungkiri dalam proses alokasi air, kadang-kadang terjadi konflik antar petani yang merasa dibedakan antara satu dengan petani lainnya, misalnya satu petani diberikan alokasi air yang memadai sementara petani lainnya tidak diberikan alokasi air yang memadai. Jika terjadi konflik seperti ini, maka P3A diminta untuk bisa menjadi penengah dan pendamai.

Sementara itu, berkaitan dengan P3A tidak memberikan air irigasi selain untuk pertanian, 86 responden (86%) setuju dengan hal ini dengan alasan bahwa air irigasi memang khusus untuk pertanian saja, sementara 14 responden lainnya (14%) tidak setuju dengan alasan bahwa air irigasi dapat juga dipergunakan untuk keperluan lainnya, seperti untuk minum ternak bagi yang memiliki peternakan, mencuci, dan lain sebagainya.

B. Uji Hipotesis

Dari 10 pertanyaan yang diajukan kepada petani tentang persepsi mereka terhadap pengelolaan irigasi diperoleh rerata rill ($mean/x$) sebesar 3,26, interval for mean (μ) sebesar 4,00, dan standar deviasi (S) sebesar 0,85 dengan jumlah responden adalah 100 orang.

Tabel 6
Perhitungan Descriptive Data
Descriptive

	Statistic	Std. Error
Mean	3,26	.273
95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	3,17
	Upper Bound	4,00
5% Trimmed Mean	3,27	
Median	4,00	
Variance	2,240	
Std. Deviation	0,85	
Minimum	3	
Maximum	10	
Range	3	
Interquartile Range	1	.427
Skewness	-.309	.833
Kurtosis	.103	

Sumber: Data yang diolah, 2016

Berdasarkan tabel di atas, maka untuk melakukan pengujian hipotesis perlu dilakukan pengujian secara statistic dengan Z observasi dalam distribusi normal uji satu sisi (*one tailed*) dengan nilai alpha 5%. Hipotesis nol (H_0) akan diterima jika $Z_{hitung} < Z_{tabel}$ dan H_0 akan ditolak jika $Z_{hitung} > Z_{tabel}$. Nilai Z_{tabel} adalah $Z = 0,5 - \alpha$, maka nilai Z_{tabel} penelitian ini adalah 0,45 ($=0,5 - 0,05$). Selanjutnya hasil perhitungan Z_{hitung} diperoleh sebesar:

$$Z = \frac{x - \mu}{S - \sqrt{n}}$$

$$Z = \frac{3,26 - 4}{0,85 - 10}$$

$$Z = 0,080$$

Dengan demikian, jika dibandingkan antara Z_{hitung} dan Z_{tabel} maka diperoleh hasil bahwa hipotesis nol (H_0) penelitian ini diterima yang artinya petani memiliki persepsi yang positif terhadap pengelolaan irigasi. Hal ini karena nilai Z_{hitung} (0,080) penelitian ini lebih kecil dari nilai Z_{tabel} (0,45).

C. Pembahasan

Dari penelitian ini diketahui bahwa persepsi petani terhadap pengelolaan irigasi di daerah irigasi Bandar Sawah Padang Kabupaten Solok Selatan, khususnya terhadap kinerja P3A dalam melakukan pengelolaan irigasi sudah cukup baik, dimana berdasarkan hasil dari analisa angket dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa P3A sudah melaksanakan peran dalam melakukan pengelolaan jaringan irigasi. Hanya saja, hal yang menarik ditemukan dalam penelitian ini adalah dalam hal pengelolaan sistem pemeliharaan jaringan irigasi, di mana rata-rata responden setuju jika pemeliharaan dilakukan oleh pemerintah, bukan oleh lembaga P3A dan iuran dari petani pemakai air. Menurut

mereka, biaya pemeliharaan dan perawatan jaringan irigasi sangat besar, sehingga memang dibutuhkan tanggung jawab pemerintah untuk menanganinya.

Bahkan dalam hal P3A ingin merekrut sumber daya untuk tenaga kerja dalam hal pemeliharaan jaringan irigasi, rata-rata petani juga tidak setuju karena membutuhkan biaya yang besar pula, termasuk biaya untuk penggajian. Petani juga tidak setuju jika iuran dibebankan kepada mereka setiap kali panen untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan saluran irigasi, karena uang yang diperoleh saat panen biasanya hanya cukup untuk pemenuhan kebutuhan pokok keluarga saja.

Kondisi di atas, jika dikaitkan dengan kebijakan pemerintah, maka terdapat perbedaan persepsi antara petani pemakai air dengan pemerintah, dimana pada tahun 1999, Presiden mengeluarkan Inpres No.9 tahun 1999 tentang Pembaruan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (PKPI) yang berisi instruksi kepada Menteri Pekerjaan Umum untuk;

1. Melakukan koordinasi mempersiapkan kerangka peraturan dan perundangan dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memperbaharui kebijakan pengelolaan irigasi
2. Pembaruan Kebijakan Pengelolaan Irigasi yang dimaksud meliputi:

Email: amriismail3@yahoo.com

- a. Pengaturan kembali fungsi dan tugas lembaga pengelola irigasi
- b. Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (P3A)
- c. Penyerahan Pengelolaan Irigasi kepada P3A
- d. Pengaturan Pembiayaan Pengelolaan Irigasi
- e. Keberlanjutan Pengelolaan Sistem Irigasi.

Jika dilihat dari poin 2 bagian (c), maka jelas bahwa pengelolaan irigasi telah diserahkan oleh pemerintah pada P3A, sehingga pemerintah tidak lagi memiliki tanggung jawab penuh dalam pengelolaan irigasi, termasuk dalam pemeliharaan dan perawatan, karena telah dilimpahkan kepada P3A. Dengan demikian, petani pemakai air tidak bisa selalu bergantung lagi kepada pemerintah dalam melakukan pemeliharaan dan perawatan saluran irigasi. Sedapat mungkin petani dapat membentuk P3A yang kuat dan solid serta mampu untuk menanggulangi berbagai permasalahan dalam pengelolaan saluran irigasi, termasuk melakukan pemeliharaan dan perawatan saluran irigasi.

Pelimpahan tanggung jawab dari pemerintah kepada P3A pada dasarnya memiliki alasan yang sangat logis. Alasan utama yang muncul perubahan kebijakan tersebut adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah. Namun jika dikaji

lebih dalam, perubahan tersebut juga tidak terlepas perubahan model kebijakan irigasi pada tingkatan internasional. Dominasi pemerintah dalam pembangunan irigasi pada masa revolusi hijau dipandang sebagai penyebab utama kegagalan pembangunan irigasi termasuk di Indonesia. Salah satu dari kegagalan tersebut adalah ekspansi besar-besaran daerah irigasi tidak diimbangi dengan ketersediaan dana untuk melakukan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi. Dengan demikian pemindahan tanggung jawab operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi dari pemerintah kepada P3A dipandang sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sektor irigasi. Konsep inilah yang sebenarnya diadopsi oleh pemerintah Indonesia di sektor irigasi atau yang lebih dikenal sebagai *Irrigation Management Transfer* (IMT), yang menempatkan P3A sebagai aktor utama dalam operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Salah satu prasyarat yang dibutuhkan untuk menjalankan IMT ini adalah hak guna air (*water use rights*). Bank Dunia sendiri mendefinisikan hak-hak irigasi dalam tiga kategori yaitu management kontrol, fasilitas fisik dan air. Khusus hak atas air (*water rights*) irigasi adalah seberapa banyak air yang dapat diberikan kepada petani untuk menjamin kecukupan air bagi lahan petani

anggota P3A lainnya. Pada intinya IMT mendorong adanya transfer otoritas pengambilan keputusan dalam pengelolaan irigasi kepada P3A.

Beberapa studi terhadap IMT menunjukkan dampak yang positif baik terhadap petani maupun keberlanjutan sistem irigasi. Hal ini meliputi perbaikan distribusi air yang adil kepada petani dan meningkatnya partisipasi petani dalam proses pengambilan keputusan. Namun studi lain juga menunjukkan bahwa IMT berdampak negatif, antara lain rendahnya skala ekonomi P3A untuk menyediakan layanan sesuai dengan sistem yang ada, petani juga diminta untuk membayar jasa air lebih mahal tanpa adanya perbaikan dan efisiensi layanan. Dan yang terpenting sebenarnya adalah bahwa IMT memperkenalkan P3A sebagai langkah awal untuk merubah sistem pertanian subsistem menjadi tanaman yang bersifat komersial. Dengan tanaman komersial dan ketersediaan pasar petani kecil akan mampu membayar iuran kepada P3A untuk operasional dan pemeliharaan serta perbaikan jaringan irigasi. Dan pada akhirnya pemerintah dapat menghilangkan subsidi maupun pengeluaran yang terkait dengan pembangunan irigasi.

Hal terpenting dalam pengelolaan irigasi untuk menjaga keberlanjutan fungsinya adalah pembiayaan dalam operasi

dan pemeliharaan. Pada penelitian ini juga terlihat bahwa petani masih berpendapat iuran tidak perlu dibayarkan karena untuk pemeliharaan jaringan tetap menjadi tanggung jawab pemerintah. Menghadapi fenomena yang ditemukan di lapangan mengenai persepsi tersebut, diperlukan peran yang lebih intens dari pemerintah bersama *stake holders* terkait untuk memfasilitasi kegiatan sosialisasi kebijakan pembaharuan pengelolaan irigasi yang mengkonsentrasikan kepada masalah membangkitkan kesadaran dan perhatian petani terhadap permasalahan pengelolaan irigasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa persepsi petani sangat diperlukan untuk keberlanjutan program irigasi, termasuk persepsi petani di daerah irigasi Bandar Sawah Padang di Solok Selatan. Jika petani memiliki persepsi yang positif terhadap pengelolaan irigasi yang dilakukan P3A, maka petani akan senantiasa ikut serta untuk melakukan pemeliharaan saluran irigasi. Sebaliknya, jika petani memiliki persepsi negative terhadap pengelolaan irigasi, maka petani cenderung untuk tidak ikut serta melakukan pemeliharaan saluran irigasi.

Di Daerah Irigasi Bandar Sawah Padang Kabupaten Solok Selatan, petani

Email: amriismail3@yahoo.com

memiliki persepsi positif terhadap pengelolaan irigasi yang dilakukan oleh P3A. di mulai dari persepsi terhadap perolehan air, alokasi air, system pemeliharaan irigasi, pengelolaan sumber daya, dan pengelolaan konflik. Semua hal tersebut dikelola secara baik oleh P3A sehingga menimbulkan persepsi yang positif dari petani pemakai air di Bandar Sawah Padang.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Solok Selatan. 2015. Solok Selatan dalam Angka. BPS Solok Selatan.
- Dinas PU Pengairan. 1999. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) (Modul Pelatihan), Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Yogyakarta.
- Fitria Nur Arifah. 2008. [Analisis willingness to pay petani terhadap peningkatan pelayanan irigasi melalui rehabilitasi jaringan irigasi studi kasus daerah irigasi Cisadane-Empang, Desa Pasir Gaok, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor-Jawa Barat.](#) *Tesis*. IPB (Bogor Agricultural University). Tidak dipublikasikan.
- Hadari Nawawi. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif .Cetakan Keempat. Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 13/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Irigasi.
- Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi
- Subana dan Sudrajat. 2001. Dasar-dasar Penelitian Ilmiah. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sugiyono. 2004. *Statistiska untuk penelitian*. Bandung. Alfa Beta.